LAMPIRAN-LAMPIRAN

No.	Halaman	Jenis	kutipan
1.	19	KUH Perdata	<p>Pasal 119: <i>Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri</i></p>
2.	19		<p>Pasal 128 : <i>Setelah bubar nya harta bersama,. kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab XVII Buku Kedua, mengenai pemisahan harta peninggalan, berlaku terhadap pembagian harta bersama menurut undang-undang.</i></p>
3.	19		<p>Pasal 139 : <i>Para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut.</i></p>

No.	Halaman	Jenis	Kutipan
4.	2, 10, 14, 20, 35, 45, 91, 117	Undang-Undang Perkawinan	Pasal 35 <i>(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama.</i> <i>(2) Harta bawaan dan masing-masing suami dan isteri dan harta benda. yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.</i>
5.	2, 20, 35, 45		Pasal 36 <i>(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.</i> <i>(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.</i>
6.	35, 45, 46		Pasal 37: <i>Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing</i>
7.	2, 20, 46, 47, 91, 117,	Kompilasi Hukum Islam	pasal 85: <i>Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.</i>
8.	2, 20, 47, 117		Pasal 86 : <i>(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.</i> <i>(2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.</i>
9.	2, 21, 47		Pasal 87: <i>(1) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.</i> <i>(2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.</i>

No.	Halaman	Jenis	Kutipan
10.	47	Kompilasi Hukum Islam	Pasal 88: <i>Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.</i>
11.	47		Pasal 89: <i>Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun harta sendiri.</i>
12.	47		Pasal 90 <i>istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.</i>
13.	48		Pasal 91 <i>(1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya</i>
14.	48		Pasal 92 <i>Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.</i>
15.	48		Pasal 93 <i>(1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing. (2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. (4) Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta istri</i>
16.	48		Pasal 94 <i>(1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.</i>

No.	Halaman	Jenis	Kutipan
17.	48	Kompilasi Hukum Islam	<p>Pasal 95</p> <p><i>(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.</i></p> <p><i>(2) Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.</i></p>
18.	49, 115		<p>Pasal 96</p> <p><i>(1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,</i></p> <p><i>(2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hutang harus ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.</i></p>
19.	49		<p>Pasal 97</p> <p><i>Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.</i></p>
20.	118, 120		<p>Pasal 149</p> <p><i>Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:</i></p> <p><i>(a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul.</i></p>
21.	118, 119, 120		<p>Pasal 158</p> <p><i>Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat a. belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhul b. perceraian itu atas kehendak suami.</i></p>
22.	118, 119		<p>Pasal 159</p> <p><i>Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158.</i></p>
23.	118, 119, 120		<p>Pasal 160</p> <p><i>Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.</i></p>

No.	Halaman	Jenis	Kutipan
24.	125	Kompilasi Hukum Islam	Pasal 171 <i>(f) Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.</i>
25.	126		Pasal 209 <i>(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari warisan anak angkatnya.</i> <i>(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.</i>